

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v5i4)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v5i4>

Received: 29 Oktober 2023, Revised: 5 November 2023, Publish: 16 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### Strategi Optimalisasi Sistem Aplikasi SINOPEN untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Non-Perizinan OSS di DPMPTSP Kota Padang

Anita Zulman<sup>1</sup>, Syamsir<sup>2</sup>, Wahyu Shandi Kurniawan<sup>3</sup>, Alex Putra<sup>4</sup>, Pitri Andini<sup>5</sup>, Richa Angelina<sup>6</sup>, Syahrul Waldi<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [anitazulman@gmail.com](mailto:anitazulman@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [syamsirsaili@yahoo.com](mailto:syamsirsaili@yahoo.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [wahyushandikurniawan@gmail.com](mailto:wahyushandikurniawan@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [alexputra734@gmail.com](mailto:alexputra734@gmail.com)

<sup>5</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [andinifitri2112@gmail.com](mailto:andinifitri2112@gmail.com)

<sup>6</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [anggalinaricha@gmail.com](mailto:anggalinaricha@gmail.com)

<sup>7</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [syahrulwaldi8@gmail.com](mailto:syahrulwaldi8@gmail.com)

Corresponding Author: [anitazulman@gmail.com](mailto:anitazulman@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The development of increasingly sophisticated technology influences elements of people's lives, such as government governance in creating public services, such as policy licensing services used by the government or regional governments to control the negative impacts of social and economic activities. Online Single Submission (OSS) is a business permit issued by the ministry to carry out permits such as business development permits, etc. This research uses descriptive, qualitative methods, with data collection techniques in this research namely observation, interviews and documentation methods. Based on the research results, the implementation of OSS still has shortcomings such as the absence of a research permit feature for students or academic staff, practice permits for doctors and staff. other health problems, problems that prevent OSS from running perfectly, the emergence of non-OSS licensing innovations in the Padang City DPMPTSP, the SINOPEN application is the provision of legality for its intended purpose, not a specific business/activity. This application contains various licensing service features that are not available in OSS services, such as research permits for students or other academics, as well as practice permits for doctors and other health workers throughout the city of Padang.*

**Keyword:** *E-government, Aplikasi Sinopen, perizinan non OSS*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mempengaruhi elemen kehidupan masyarakat, seperti tata kelola pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik, seperti pelayanan perizinan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengontrol dampak negatif dari aktivitas sosial dan ekonomi. *Online Single Submission (OSS)* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan kementerian melakukan perizinan seperti izin

pembangunan usaha, dll. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif, kualitatif, dengan teknik penumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, berdasarkan hasil penelitian penerapan OSS masih memiliki kekurangan seperti belum adanya fitur izin penelitian untuk mahasiswa atau tenaga akademisi, izin praktek untuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya, persoalan yang membuat OSS belum berjalan sempurna, munculnya inovasi perizinan non OSS di DPMPSTP Kota Padang aplikasi SINOPEN adalah pemberian legalitas diperuntukannya bukan usaha/kegiatan tertentu. Aplikasi ini memuat berbagai fitur pelayanan perizinan yang tidak ada didalam pelayanan OSS seperti perizinan penelitian mahasiswa atau akademisi lainnya, serta surat izin praktek bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya se Kota Padang.

**Kata kunci:** E-goverment, Aplikasi Sinopen, Perizinan non OSS

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mempengaruhi seluruh elemen kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, social budaya, politik dan sebagainya. Penggunaan teknologi ini segala kegiatan semakin maju, salah satunya pada tata kelola pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik (Linda:2023). Pelayanan menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, berbagai actor yang menyelenggarakan pelayanan salah satunya birokrat merupakan suatu organisasi dalam lembaga ataupun instansi pemerintah yang bekerja dalam mencapai tujuan dari instansi tersebut ( Muhammad :2018). Peran birokrat menjadi salah satu aspek yang penting dalam menyelenggarakan bentuk pelayanan publik . Pelaksanaan pelayanan publik terus bertransformasi dengan mengikuti perkembangan era digitalisasi dengan memenuhi kebutuhan publik yang semakin modern. Salah satu penerapan *Egoverment* atau pemerintahan elektronik merupakan tata kelola pemerintah dengan penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat beserta pihak lain, seperti melakukan pelayanan (Ana Maria:2022).

Pelayanan publik telah berkembang, salah satu pada layanan perizinan, kebijakan yang digunakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengontrol dampak negatif dari aktivitas sosial dan ekonomi. Izin juga melindungi kepemilikan atau penyelenggaraan bisnis secara hukum. Pengendalian perizinan memerlukan alasan yang jelas dan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai referensi yang dilakukan berbasis digitalisasi seperti izin pembangunan, izin usaha dan sebagainya melalui aplikasi OSS (Uchaimid: 2019). Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online submission online* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diberikan oleh lembaga OSS kepada pelaku atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Atau Wali Kota (Shandi:2018). Usaha dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai pelayanan perizinan berusaha sistem OSS yang terintegrasi secara elektronik bertujuan untuk mempercepat dan peningkatan penanaman modal dan usaha, serta memfasilitasi usahawan, untuk menyederhanakan pendaftaran dan pengawasan kegiatan bisnis seperti, izin usaha diterbitkan untuk setiap sektor dengan format standar namun berbeda nomenklatur izin. Registrasi wajib dilakukan dengan NIK/paspor dari penanggungjawab perusahaan yang tercantum dalam AKTA perusahaan. Namun dalam penerapan aplikasi OSS ini masih mengalami kekurangan, salah satunya OSS hanya perizinan bangunan gedung (PBG) atau pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) dan tata ruang dan permasalahan lainnya seperti system OSS yang lambat dalam memproses layanan masyarakat dan masih terdapat banyak kurang fitur-fitur perizinan yang belum tercakup diOSS salah satunya izin penelitian untuk mahasiswa atau tenaga pendidik, izin praktek untuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya, persoalan yang membuat OSS belum berjalan sempurna (Kompas.com).

Hal ini dilakukan oleh DPMPTSP Kota Padang dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau stakeholder. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menerapkan *electronic government* dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya di Kota Padang. Salah satu munculnya inovasi berbasis digitalisasi yaitu perizinan non OSS. Perizinan non OSS merupakan perizinan yang diproses melalui sistem di luar OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) dan tidak diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, inovasi aplikasi SINOPEN (Sistem Informasi Non Perizinan adalah pemberian legalitas/rekomendasi kepada seseorang yang peruntukannya bukan usaha/kegiatan tertentu. Aplikasi ini memuat berbagai fitur-fitur pelayanan perizinan yang tidak ada didalam pelayanan OSS seperti perizinan penelitian mahasiswa atau akademisi lainnya, serta surat izin praktek bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya se Kota Padang.

Tujuan aplikasi SINOPEN akan mendukung terciptanya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima. Kelebihan lainnya adalah hemat alat tulis kantor, waktu, dan lemari/gudang penyimpanan, sehingga memiliki efektivitas lebih baik. Selain itu, inovasi ini juga mendukung terpenuhinya *smart ASN* dan *smart governance* dalam penggunaan IT.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana pengoptimalisasian aplikasi SINOPEN dalam pengelolaan dan pengamanan data digital untuk meningkatkan efisiensi proses non-perizinan OSS di DPMPTSP kota Padang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan tantangan aplikasi SINOPEN. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan terkait data digital yang semakin meningkat dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan solusi yang inovatif dan efektif untuk masalah ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif, kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai strategi optimalisasi sistem aplikasi SINOPEN untuk meningkatkan efisiensi proses non-perizinan OSS di DPMPTSP Kota Padang, teknik penumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada hari senin 8 Oktober 2023, Penelitian dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu, hal ini untuk mengumpulkan data yang akan ditanyakan kepada narasumber, jawaban-jawaban dari narasumber kemudia direkam dengan menggunakan alat perekam seperti *handphone*, yang dijadikan sebagai bukti penguat pada hasil penelitian ini. Penelitian ini narasumber yang dipilih adalah ibuk Elfi Hermita selaku kabid data dan teknologi informasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padang. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan penganalisisan secara deksriptif kualitatif dalam mengetahui strategi dalam penerapan aplikasi SINOPEN dalam meningkatkan efisiensi pelayanan yang tidak berbasis OSS (*Online Single Submittion*).

Metode penelitian berisi jenis penelitian, sampel dan populasi atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur dan teknik penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan dunia teknologi yang saat ini semakin berkembang tentu akan menjadikan banyak inovasi-inovasi yang bisa diterapkan di dalam sistem pemerintahan, dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat memudahkan masyarakat baik dalam hal pengurusan sesuatu ataupun yang lainnya yang bisa membuat birokrasi di indonesia menjadi

lebih simple dan mudah. Salah satu inovasi yang dilakukan khususnya Pemerintah Kota Padang dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi ini adalah dengan membentuk dan membuat suatu aplikasi berbasis teknologi yang tujuannya adalah memudahkan proses untuk pengguna dan pemakai dalam hal yang berkepentingan dalam suatu pengurusan apapun, nama aplikasi ini adalah aplikasi SINOPEN. Aplikasi ini telah dirilis dan diluncurkan oleh Pemerintah Kota Padang sejak tahun 2022 lalu, namun setelah diluncurkannya aplikasi tersebut tentu akan ada bahan evaluasi yang menjadi fokus utama dalam pengembangan aplikasi ini. Pada Penelitian ini telah dilakukan wawancara bersama ibu Elfi Hermita Selaku Kabid Data Dan Teknologi Informasi dan didapatkan beberapa penjelasan mengenai aplikasi SINOPEN ini. Beberapa hal itu adalah sebagai berikut :

### **Non perizinan OSS di DPMPTSP Kota Padang**

OSS Merupakan izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah izin usaha yang diterbitkan oleh organisasi OSS kepada dan atas nama menteri, pimpinan organisasi, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya OSS ini dapat memudahkan pengurusan berbagai perizinan berusaha (lokasi, lingkungan, pembangunan dan kegiatan operasional lainnya) ditingkat pusat atau daerah, namun ketika perizinan-perizinan tidak lengkap diOSS seperti izin penelitian, maka ini yang membuat harus adanya pelayanan non perizinan OSS. Pelayanan ini merupakan izin kegiatan yang tidak memerlukan otoritas kewenangan OSS, karena ini hanya sebagai pelengkap dari OSS untuk melakukan Izin penelitian seperti mahasiswa, dokter dan sebagainya dengan menggunakan aplikasi sinopen.

*“Aplikasi oss dengan sinopen berbeda, OSS itu terkait aplikasi perizinan usaha yang dikrit atau dibuat oleh kementerian BKPM RI, sementara aplikasi sinopen non perizinan OSS ini adalah aplikasi untuk mengakomodir perizinan perizinan, yang tidak ada dioss, beberapa fitur-fitur yang tidak tersedia di oss, maka terdapat di sinopen, sinopen adalah aplikasi berbasis IT yg dibangun oleh DPMPTSP Kota Padang, setiap daerah-daerah berbeda, ada juga yang masih manual. Untuk kota Padang sudah membuat aplikasi sinopen ini dibangun ditahun 2022 pertengahan, Layanan diaplikasikan di sinopen yg sudah terakomodir, dalam sinopen itu baru izin penelitian, untuk perizinan berusaha sektor kesehatan, perizinan usaha non oss. Sektor kesehatan itu adalah untuk mengakomodir surat izin, praktek tenaga kesehatan, sip tenaga kesehatan. Terdapat 24 jenis. seperti dokter perawat, dan sebagainya” ujar Kabid Data Dan Teknologi Informasi*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tampak kabid DPMPTSP Kota Padang, menerapkan aplikasi sinopen sebagai non perizinan oss untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan penelitian seperti mahasiswa dan dokter, karena penelitian yang dilakukan dan pengambilan data tidak perlu diatur oleh pemerintahan pusat, melainkan kewenangan dari pemerintah daerah dalam mengakomodir urusannya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Implementasi aplikasi sinopen sebagai non perizinan OSS dalam pelayanan publik, dan didukung penyelenggaraan non perizinan OSS berusaha di daerah dilakukan yang cepat mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Perizinan non OSS merupakan perizinan yang diproses melalui sistem di luar OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) dan tidak diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, inovasi aplikasi SINOPEN (Sistem Informasi Non Perizinan adalah pemberian legalitas/rekomendasi kepada seseorang yang peruntukannya bukan usaha/kegiatan tertentu. Aplikasi ini memuat berbagai fitur-fitur pelayanan perizinan yang tidak ada didalam pelayanan OSS seperti perizinan penelitian mahasiswa atau akademisi lainnya, serta surat izin praktek bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya se Kota Padang.

## Hambatan Implementasi Sistem Aplikasi Sinopen dalam Proses Non Perizinan OSS

Dalam setiap proses pelaksanaan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Dalam proses pelaksanaannya tentu ada hambatan yang menjadi bahan evaluasi dari pelaksanaan sebuah inovasi. Hambatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu yang bisa saja menjadi faktor pendorong ataupun penghambat dari pelaksanaan sebuah inovasi. Adapun faktor-faktor yang bisa menjadi penghambat dari pelaksanaan sebuah inovasi menurut variabel model implementasi dari George C. Edward III yaitu seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan dilaksanakan dengan tepat dan benar maka akan menjadi penghambat dari pelaksanaan sebuah inovasi yang dilakukan pemerintah (Rahmat & Kismartini, 2020)

Selain itu menurut Albury dalam Suwarno yang dikutip oleh (Tiranika & Maesaroh, 2020), faktor penghambat dari pelaksanaan inovasi yang dilakukan juga berasal dari hal-hal berikut :

1. Budaya yang tidak menyukai resiko (*risk aversion*).
2. Secara kelembagaan, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani risiko yang muncul akibat dari pekerjaannya.
3. Keengganan menutup program yang gagal.
4. Ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi follower.
5. Hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek.
6. Hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel.
7. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya masih sangat sedikit.
8. Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi kebutuhan pekerjaannya. Namun disisi lain muncul hambatan dari segi budaya dan penataan organisasi. Budaya organisasi ternyata belum siap untuk menerima sistem yang sebenarnya berfungsi memangkas pemborosan atau inefisiensi kerja.

Dari faktor-faktor diatas, maka dalam pelaksanaan inovasi perlu memperhatikan faktor yang dapat menjadi penghambat terlaksananya inovasi yang dilakukan. Faktor penghambat pelaksanaan inovasi tidak hanya berasal dari dalam organisasi pemerintah yang menjalankan proses inovasi tetapi juga berasal dari luar organisasi seperti masyarakat. Jika dilihat dari masyarakat itu sendiri masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham dengan teknologi yang berkembang, selain itu tidak memiliki smartphone dan jaringan yang tidak stabil. Sehingga mereka merasa dalam kepengurusan berkas lebih memilih secara manual. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat dalam pelayanan berbasis aplikasi atau egovernment. (Gea, Rahawarin & Ivonny, 2023)

Pelaksanaan inovasi dari DPMPTSP berupa sistem aplikasi sinopen dalam proses Non Perizinan OSS terdapat beberapa hambatan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan sistem aplikasi sinopen yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dari pengguna Aplikasi Sinopen  
Salah satu faktor penghambat yang menjadi masalah umum dari pelaksanaan sebuah inovasi yaitu kurangnya pemahaman dari pengguna inovasi. Pengguna aplikasi sinopen yang masih melek IT menyebabkan hambatan bagi pengguna aplikasi sinopen, sehingga pengguna lebih cenderung menggunakan cara manual dalam pengurusan perizinan maupun non perizinan. Melek IT tidak hanya di hanya terjadi pada masyarakat biasa yang tidak memiliki pendidikan, namun juga masyarakat yang sudah memiliki jenjang pendidikan.
2. Tidak terlalu memperhatikan proses dan tahapan penggunaan Aplikasi Sinopen

Pada proses dan tahapan penggunaannya, aplikasi sinopen akan memberikan notifikasi berupa e-mail kepada pengguna. Namun notifikasi ini sering kali diabaikan oleh pengguna sehingga proses dan tahapan dalam penggunaan aplikasi tidak dapat dilanjutkan. Hal ini memunculkan perspektif pengguna bahwa penggunaan aplikasi sinopen yang rumit atau memakan waktu lama. Hambatan seperti ini sering terjadi pada pengguna yang memiliki kesibukan sehingga tidak memiliki waktu untuk menggunakan atau memegang handphone terlalu lama.

3. Masih pada tahap perkembangan

Hambatan lain dari aplikasi sinopen yaitu aplikasi ini masih belum memiliki fitur yang lengkap, dimana masih ada beberapa perkembangan yang akan dilakukan sehingga adanya keterbatasan dalam penggunaannya. Namun keterbatasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perkembangan aplikasi sinopen kedepannya.

### **Strategi Optimalisasi Sistem Aplikasi Sinopen dalam Non Perizinan OSS**

Perkembangan e-Government merupakan upaya pengembangan pengelolaan pemerintahan yang berbasis perangkat elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Berkat berkembangnya manajemen elektronik, sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan ditata dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pengembangan suatu aplikasi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan tentu ada strategi-strategi yang dilakukan dalam upaya pengembangannya. Secara defenisi, Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi perusahaan, melalui misi. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan E-government, yang menjadikan e-government sangat layak untuk diterapkan sebagai upaya dan dukungan dari pengembangan pelayanan kepada warga negara atau publik. Dalam instruksi presiden ini ada beberapa strategi pemerintah dalam penyusunan e-government yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang baik, terpercaya, serta mudah untuk dijangkau oleh masyarakat luas. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam mencapai hal ini adalah dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan.
2. Mengatur sebaik mungkin sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah secara menyeluruh. Maksudnya adalah mempersiapkan sebaik mungkin SDM dalam pemerintahan agar mampu beradaptasi dengan sistem yang sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain penyajian informasi yang lengkap dan memadai, pentingnya menjaga keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan
4. Meningkatkan serta melibatkan peran dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Keikutsertaan dunia usaha lebih mengarah kepada partisipasi dalam pemanfaatan dan penggunaan e-government sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah disertai dengan peningkatan minat membaca oleh masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistic dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pematapan, dan pemanfaatan.

Dalam aplikasi yang digagas dan dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang yaitu aplikasi SINOPEN, menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun dengan adanya kendala ini tentu akan menjadi bahan evaluasi dari pemerintahan Kota Padang dalam mengembangkan

aplikasi tersebut. Pemerintah Kota Padang khususnya dari pihak DPMPTSP mempunyai strategi-strategi yang akan dilakukan kedepannya dalam mengembangkan aplikasi SINOPEN ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di DPMPTSP Kota Padang pada tanggal 8 Oktober 2023 yang lalu, keterangan yang di dapatkan dari Ibuk EH sebagai Kabid Data Dan Teknologi Informasi bahwasannya untuk pengembangan aplikasi SINOPEN ini kedepannya tentu akan semakin terus dilakukan, salah satunya adalah mengevaluasi permasalahan permasalahan yang ada seperti kurang paham nya masyarakat dalam penggunaan aplikasi ini, tentu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pengguna aplikasi SINOPEN.

Namun ditengah pembicaraan dalam proses strategi dalam pengembangan aplikasi SINOPEN ini, Ibuk EH Sebagai Kabid menjelaskan dan menerangkan bahwa akan ada wacana dari pemerintah pusat untuk menerapkan MPP Digital. Dalam MPP Digital tersebut jika disambungkan dengan aplikasi sinopen akan membuat pengalih fungsian yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah Kota Padang namun jika wacana ini akan dilakukan maka aplikasi SINOPEN ini akan dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat. Ini menjadi suatu permasalahan ketika aplikasi ini mengalami perubahan dalam pengelolaannya, karena berdasarkan hasil wawancara, jika aplikasi ini dikelola oleh Pemerintah Pusat maka akan sulit untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, namun jika aplikasi ini dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah tentu saja akan terasa menjadi lebih dekat kepada masyarakat dalam mengatasi problem atau permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

## KESIMPULAN

E-government atau tata kelola pemerintah berbasis elektronik, Mengembangkan sistem pelayanan yang baik, terpercaya, serta mudah untuk dijangkau oleh masyarakat luas. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam mencapai hal ini adalah dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan. Mengatur sebaik mungkin sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah secara menyeluruh. Maksudnya adalah mempersiapkan sebaik mungkin SDM dalam pemerintahan agar mampu beradaptasi dengan sistem yang sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. salah satunya penerapan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien seperti dalam melakukan perizinan, seperti aplikasi OSS yang mencakup aplikasi perizinan terdiri dari izin pembangunan usaha dan masyarakat, dan munculnya inovasi pada perizinan *non* OSS merupakan perizinan yang diluar online single *Submission*, dan tidak diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Inovasi aplikasi SINOPEN (Sistem Informasi Non Perizinan adalah pemberian legalitas/rekomendasi kepada seseorang yang peruntukannya bukan usaha/kegiatan tertentu. Aplikasi ini memuat berbagai fitur-fitur pelayanan perizinan yang tidak ada didalam pelayanan OSS seperti perizinan penelitian mahasiswa atau akademisi lainnya, serta surat izin praktek bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya se Kota Padang. aplikasi ini diciptakan untuk melengkapi fitur-fitur yang tidak lengkap pada aplikasi OSS, seperti izin penelitian mahasiswa atau akademisi, serta izin praktek bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Aplikasi sinopen ini aplikasi yang dikelola oleh pemerintahan kota padang, yang berhak melakukan pelayanan melalui aplikasi ini adalah seluruh masyarakat se kota padang.

## REFERENSI

- Ana, MAaria Sri Hariyat. (2022). *Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak)*, Volume 4 | Nomor 3 | Tahun 2022
- Hamrun.(2019). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna Nakhoda*: Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2
- I Wayan,Wiradarma. (2022). *Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Ease Of Doing Business Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, hlm. 102-111
- Mega,Oktavia Budi Ratnasari.(2022). *Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi pada “SURADI” di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang)*, JIAP Vol 8, No 1, pp 35-44,2022
- Mesra, Rita Murni Gea. (2023). *Analisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Maluku*, Jurnal Professional, Vol. 10 No. 1 Juni 2023 page: 121 – 126|
- Uchaimid, Biridlo’i.(2019). *Inovasi Pelayanan Perizinan Melaluionline Single Submission(Oss):Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp)Kabupaten Bekasi*, Volume10 Nomor 2Tahun 2019
- Usy,Tiranika, Maesaroh. (2020) *Inovasi Pelayanan Superone (Surat Pengantar Online) Di Kecamatan Candisari Kota Semarang*. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik Issn Online: 2685-3582 Vol 2, Nomor 2, Desember 2020 160
- Rahmat, Rafinzar , Kismartini. (2020). *Kolaborasi Inovasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Faktor Pendukung Dan Penghambat Program E-Mussrenbang Kota Surabaya)* Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2020 Volume 6 Nomor 2 Website <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/>